

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan tantangan yang dikenal secara luas di hampir semua negara di seluruh dunia. Hal ini selalu menjadi fokus pembicaraan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. (UNDP, 2020) menjelaskan bahwa kemiskinan mengindikasikan kurangnya kepemilikan dan pendapatan, atau lebih detailnya, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Ini merupakan masalah yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan di seluruh dunia melalui programnya yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs adalah serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB, yang meliputi berbagai isu sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. SDGs juga dikenal sebagai "*Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Konsep SDGs merupakan kelanjutan dari Konsep Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian, kerangka pembangunan yang sebelumnya terkait dengan MDGs kini telah digantikan oleh SDGs sebagai respons terhadap perubahan situasi global (Anita, 2018, hlm. 1).

Konsep SDGs sendiri pertama kali diinisiasi dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan dari konferensi ini adalah mencapai kesepakatan global yang bersifat universal untuk menjaga keseimbangan antara tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam upaya menjaga keseimbangan tersebut, SDGs didasarkan pada lima prinsip utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan, dengan tujuan akhir mencapai tiga aspirasi mulia pada tahun 2030, yakni mengakhiri kemiskinan,

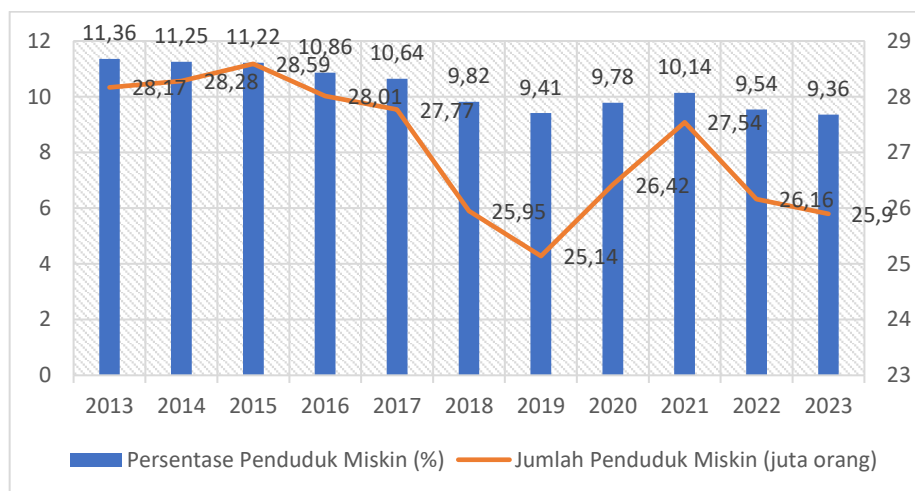
mencapai kesetaraan, dan menangani perubahan iklim. Meskipun ada dua pencapaian lain yang penting, kemiskinan tetap menjadi fokus utama. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dirumuskanlah 17 Tujuan Global, di antaranya adalah eliminasi kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia (UNDP, 2024, hlm. 1).

Menurut laporan Global Finance, pada tahun 2022 Indonesia telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 negara termiskin di dunia yakni urutan ke-91 dengan PDB dan PPP sebesar 15.855 dolar AS. Namun, pada tahun 2023, peringkat Indonesia menurun di bawah Vietnam dan Filipina. Meskipun termasuk dalam 100 negara termiskin, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding beberapa negara besar di Asia yang berada di peringkat lebih rendah seperti Vietnam di peringkat ke-82, Filipina ke-72, Kamboja ke-46, dan Timor Leste ke-31 (Abdurohman dan Imanudin, 2023, hlm. 2).

Pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas faktor penyebab, indikator, dan isu-isu yang terkait. Kemiskinan tidak lagi hanya dipandang dari segi ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi-dimensi sosial, kesehatan, dan pendidikan (Chandrawati, 2021, hlm. 39-40). Kemiskinan merupakan tantangan yang rumit, umum, dan memiliki banyak dimensi, sehingga menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan (Ferezagia, 2018, hlm. 2).

Penyebab kemiskinan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua faktor utama: internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya adalah sikap yang pasif, kurangnya dedikasi dalam usaha, kondisi fisik yang tidak optimal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan kerja, tingginya harga kebutuhan pokok, beban hidup keluarga yang berat, keterbatasan sumber daya baik alam maupun modal, serta kualitas kesehatan yang kurang baik (Abdi, 2021). Lalu indikator masyarakat miskin juga ada pada faktor pengeluaran, BPS mencatat, garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp.550.458. Artinya, penduduk dengan jumlah pengeluaran kurang dari itu akan masuk kategori miskin. Angka tersebut

naik 2,78 persen dibandingkan periode September 2022 dan naik 8,90 dibandingkan periode Maret 2022 (BPS, 2023c).

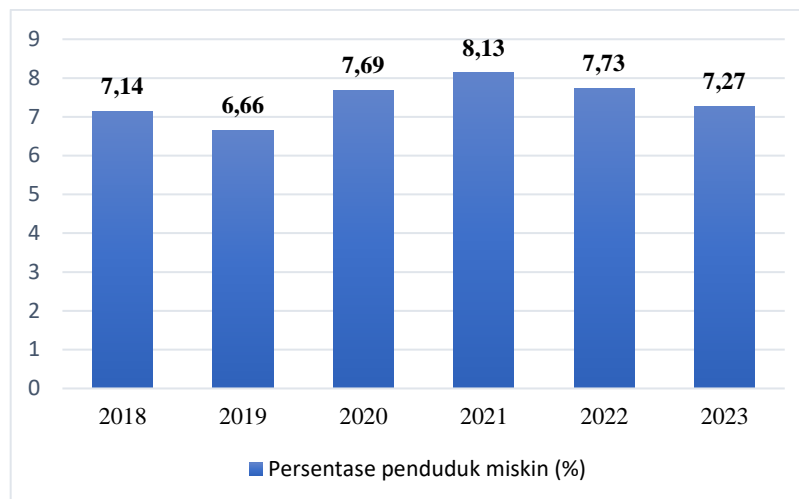


Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Sumber: (BPS, 2023d), diolah penulis

Menurut data pada Gambar 1.1, secara keseluruhan dalam rentang waktu September 2013 hingga Maret 2023, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam hal jumlah maupun persentase, kecuali pada bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada bulan-bulan tersebut terjadi setelah terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok, yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Di sisi lain, peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 dan September 2020 terjadi karena pembatasan mobilitas penduduk yang diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia (BPS, 2023d).

Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan jumlah kemiskinan kedua terbesar setelah Jawa Timur, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 4,07 juta orang. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Barat meliputi pendapatan rumah tangga yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, kurangnya akses terhadap pendidikan formal maupun informal, rendahnya taraf kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta terbatasnya peluang kerja yang tersedia (Sejati, 2020, hlm. 98-99).



Gambar 1. 2 Tingkat Penduduk Miskin Kabupaten Bogor

Sumber: (BPS, 2023b), data diolah penulis

Menurut data yang tercantum dalam Gambar 1.2 pada tahun 2021, Kabupaten Bogor mencatat adanya pertambahan jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Peningkatan tingkat kemiskinan ini sebagian disebabkan oleh lonjakan angka pengangguran di Kabupaten Bogor pada tahun sebelumnya, yang mencapai 5,23 persen, naik dari 9,06 persen menjadi 14,29 persen (Munandar, 2021, hlm. 1).

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak, dengan hampir 474.000 jiwa, melebihi jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota lain di wilayah tersebut BPS, (2022). Menurut BPS, (2020) Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah mencapai 6 juta jiwa pada tahun 2020. Diikuti oleh Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung masing-masing dengan jumlah penduduk sebanyak 3,9 juta jiwa. Kepadatan penduduk yang tinggi di Kabupaten Bogor, bersamaan dengan dampak Covid-19, meningkatnya angka pengangguran, dan seringnya terjadinya bencana alam, merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di wilayah tersebut. (Awaludin, 2020, hlm. 1).

Salah satu daerah tertinggal yang ada di Kab. Bogor yaitu desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kab. Bogor. Desa ini termasuk dalam kategori desa miskin

dari 4 desa yang dikategorikan tertinggal di Kab. Bogor secara keseluruhan (Sudarno, 2022, hlm. 2). Menurut Sudarno, (2022, hlm. 2) juga indikator desa ini dikategorikan tertinggal, yaitu indikator lemahnya ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan.

Masalah kemiskinan keluarga dianggap sebagai permasalahan sosial yang rumit di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan model CIBEST (*Centre of Islamic Business and Economic Studies*) dapat memberikan pandangan dan konsep yang relevan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan keluarga dengan perspektif Islam. CIBEST berusaha untuk menyatukan pemikiran ekonomi Islam dengan praktik ekonomi modern, serta menggabungkan prinsip-prinsip etika Islam, nilai-nilai keadilan sosial, dan tujuan kesejahteraan umat dalam konteks aktivitas ekonomi dan bisnis. Model CIBEST juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai efek dari program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, program tanggung jawab sosial perusahaan, lembaga zakat, dan lain sebagainya (Beik dan Arsyianti, 2016, hlm. 89).

Peran pendekatan CIBEST dalam mengatasi kemiskinan keluarga memiliki dampak yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi dan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan CIBEST, dilakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berperan dalam menyebabkan kemiskinan keluarga, termasuk ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, dan ketidakseimbangan ekonomi antara individu dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar penyebab kemiskinan keluarga dalam konteks Islam, CIBEST mendorong pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efisien dalam mengatasi kemiskinan serta mempromosikan inklusi ekonomi yang berkelanjutan (Beik dan Arsyianti, 2016).

Menurut Maria et al., (2023, hlm. 145), salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan keluarga adalah program pemberdayaan. Tujuan dari program pemberdayaan adalah untuk meningkatkan akses keluarga terhadap sumber daya ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, atau bantuan

keuangan. Dengan peningkatan akses ini, keluarga memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian Setiadi dan Pradana, (2022, hal. 881), mendefinisikan program pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari awal hingga tahap penindakan dan evaluasi. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat agar mencapai taraf hidup yang lebih baik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumajati et al., (2022), Maria et al., (2023), Widiyanto et al., (2021) dan Marino dan Gunawan, (2020) bahwa program pemberdayaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan penelitian Pattiasina, (2021) dan Rahmawaty et al., (2021) bahwa program pemberdayaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Melalui program pemberdayaan masyarakat, individu dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek, termasuk kewirausahaan, pemasaran, dan manajemen keuangan. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi, bukan sekadar bergantung pada bantuan sosial (Gandhawangi, 2023, hlm. 2).

Setelah melalui program pemberdayaan, aspek lain yang terkait dengan kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap penting karena memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia, dengan adanya pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, dan hanya melalui sumber daya manusia yang berkualitas tinggi seseorang dapat menjadi pekerja yang berkualitas dan mendapatkan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Thoyyibah, 2023, hlm. 341).

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik secara rohani (seperti pemikiran, imajinasi, perasaan, kreativitas, dan moralitas) maupun jasmani (termasuk indra-indra tubuh dan keterampilan-keterampilan) (Qura, 2015). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imaningsih dan Khindya, (2023), Salsabil dan Riani, (2023) dan Muhtar, (2023) bahwa

pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan penelitian Netri et al., (2023), Tungele et al., (2023) dan Pradana dan Pasaribu, (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut Imaningsih dan Khindya, (2023, hal. 3-5) menyatakan jika pendidikan mudah diakses oleh masyarakat, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan mereka. Kemiskinan dalam keluarga juga erat kaitannya dengan inklusi keuangan, yang mengacu pada akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan transfer dana. Melalui inklusi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Manajemen keuangan yang efisien dan efektif memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kemiskinan. Inklusi keuangan dapat berperan dalam membantu individu keluar dari lingkaran kemiskinan melalui penciptaan peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh pendapatan yang memadai (Rhamdani, 2021 hlm. 17).

Inklusi keuangan merujuk pada ketersediaan akses kepada berbagai institusi, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Inklusi keuangan dianggap tercapai ketika semua individu dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan. Dengan demikian, dampak yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi (Chandro, 2020, hlm. 2). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al., (2020), Kusuma dan Indrajaya, (2020) dan Nasution et al., (2017) bahwa ada pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan penelitian Maulidina et al., (2023) dan Prakarsa dan Bintoro, (2023) bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan akan berkurang ketika dalam pelaksanaan program keuangan inklusif didukung oleh kebijakan baik dari pemerintah maupun Bank

Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan (Kusuma dan Indrajaya, 2020).

Berdasarkan pada fenomena empiris yang telah diuraikan serta hasil kajian dari penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal ini, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Kemiskinan Keluarga dalam Perspektif Islam: Analisis Pengaruh Program pemberdayaan, Pendidikan dan Inklusi Keuangan (Studi Kasus pada Keluarga di Desa Sukarasa Kabupaten Bogor)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan kemiskinan dalam analisis keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemiskinan masih menjadi permasalahan global, walaupun didukung oleh kemajuan dan perkembangan zaman serta derasnya arus globalisasi, yang mempermudah dari segi ekonomi, teknologi, hingga informasi. Namun, tetap saja permasalahan kemiskinan masih belum bisa terselesaikan (Ayi, 2021)
2. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak yakni 25,9 juta orang atau 9,36% dari seluruh penduduk Indonesia yang artinya masih banyak penduduk Indonesia yang masih belum tercukupi dari segi sandang, pangan dan papan nya (Aulia et al., 2023)
3. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 merupakan jumlah terbanyak se-Jawa Barat (BPS, 2023a)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dari itu penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemiskinan keluarga, program pemberdayaan, pendidikan dan inklusi keuangan di Desa Sukarasa Kab. Bogor?
2. Bagaimana pengaruh program pemberdayaan terhadap kemiskinan di Desa Sukarasa Kab. Bogor?
3. Bagaimana pengaruh akses keuangan terhadap kemiskinan di Desa Sukarasa Kab. Bogor?

4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Desa Sukarasa Kab. Bogor?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan di Kabupaten Bogor dan juga mengetahui bagaimana pengaruh variabel Program pemberdayaan, Akses keuangan dan Pendidikan berdampak terhadap kemiskinan keluarga di Desa Sukarasa, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa manfaat ilmu pengetahuan dan *transfer knowledge* terhadap perkembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya pada bidang kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada permasalahan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan solusi praktis kepada pemerintah terkait dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Desa Sukarasa Kabupaten Bogor. Penelitian ini juga diharapkan kontribusi penting dalam memperkaya wawasan pengetahuan dibidang yang bersangkutan, termasuk membuka peluang untuk menerapkan konsep-konsep teoritis dalam situasi praktis, sehingga memperluas cakrawala pengetahuan dalam ranah tersebut.